

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asmin, S. H. (1986). *Status perkahwinan antara agama: ditinjau dari undang-undang perkahwinan no. 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Dr, P. (2008). Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R&D. CV. Alfabeta
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung, R. I. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 1(1).
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sohari, S. (2014). Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujana, IN. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal Press.

B. JURNAL

Abid, H., Rohaedi, E., & Kusnadi, N. (2022). KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 129-140.

Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 122-134.

Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239-260.

Bowontari, S. (2019). Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, 7(4).

Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181-200.

Falahiyati, N. (2018, April). HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 1, No. 1, pp. 103-113).

Handini, W. P. (2019). HAK KONSTITUSIONAL ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107-116.

Hijawati, H., & Rizayusmanda, R. (2021). HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *Solusi*, 19(1), 126-137.

- Janah, M., & Heliany, I. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DI DAERAH JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (92/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Tim.). *DELEGASI*, 1(1), 17-27.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Lex Crimen*, 6(2).
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-10.
- Martinelli, I. (2013). Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 267-283.
- Mulyadi, M. (2016). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 92-100.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. (2016). Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Rosidah, Z. N. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 175-187.

- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sari, S. M., & Ardana, P. S. (2016). PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA. *Kertha Widya*, 4(1).
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt

D. SKRIPSI DAN DISERTASI

Apriliyani, R. N. (2019). TINJAUAN YURIDIS TATACARA PROSES
PENGAKUAN DAN *PENGESAHAN ANAK DILUAR
PERKAWINAN* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung).

Hilmasari, Y. (2014). Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum (Disertasi Doktor, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar).

L. M. (2022). *ANALISIS TERHADAP PENGESAHAN ANAK DI LUAR KAWIN
SEBAGAI ANAK SAH (Studi Penetapan Nomor: 738/Pdt. P/2019/PN.
Ptk)* (Disertasi Doktor, Universitas Mataram).

Lestari, N. W. S. E. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN
PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi
Putusan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Bli)* (Disertasi Doktor, Universitas
Pendidikan Ganesha).

Nur, A. H. (2021). *PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Putusan
Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt. P/2019/PA.
Bms.)* (Disertasi Doktor,, IAIN Purwokerto).

- Paburru, F. (2022). *IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUUVIII/2010* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung).
- Pratista, Ulfi Nur Nadhiroh. (2018). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN SIRI (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang).
- Rezeki, S. (2009). *STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA* (Suatu Analisis Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST). (Skripsi Hukum Universitas Indonesia, Depok).
- Rini, I. S. (2009). *PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 74/Pdt. p/2005/PN. TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)* (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Rohim, A. *Pengesahan Asal-usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt. P/2020/PA. Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt. P/2017/PA. Bky)* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

E. WEBSITE

- Bonifacio, Dave. "Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia". LBH Unpar. 4 Maret 2021. diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>

- Hadi, Rifai. “Perbedaan Pengakuan dan Pengesahan Anak. Rifaihadicom. 6 Maret 2022, __diakses dari <https://www.rifaihadi.com/perbedaan-pengakuan-dan-pengesahan-anak/>
- Hasanah, S. “Jika Ingin Membesarkan Anak Hasil Hubungan Luar Nikah. Hukum Online. 21 September 2018. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ingin-membesarkan-anak-hasil-hubungan-luar-nikah-cl3148>
- (n.d). “Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya”. diakses dari <https://disdukcapil.salatiga.go.id/pencatatan-peristiwa-penting-lainnya/>
- Setiadi, H. “Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin”. Hukum Online, 3 Agustus 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7>
- U, Anang Fajrul. “ Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Menurut Gustav Radbruch”.Pojok Wacana. 24 Desember 2019 diakses dari <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>